

Kebangkitan Bangsa

Yanuar Nugroho

Dosen di STF Driyarkara Jakarta; Anggota Kehormatan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI); Visiting Senior Fellow ISEAS Singapura dan Penasihat CIPG

Masa depan rakyat Indonesia semata-mata terletak dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena hanya bentuk pemerintahan seperti itu saja yang bisa diterima oleh rakyat.

Dr Soetomo, Pendiri Boedi Oetomo

Hari ini kita memper-ingati Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya Boedi Oetomo 114 tahun yang lalu menandai tumbuhnya kesadaran sebagai "Orang Indonesia" yang saat itu menjadi koloni Belanda. Kesadaran ini menjadi penggerak utama yang membawa Indonesia keluar dari penjajahan.

Kini, setelah hampir 77 tahun merdeka, ke mana kesadaran sebagai "Orang Indonesia" yang memerdekakan, membawa kita sebagai bangsa? Tak mudah menjawab pertanyaan ini karena gagasan tentang orang, apalagi bangsa, Indonesia kian jarang didalami.

Lebih sering kita bicara tentang kepentingan sekelompok atau segolongan orang yang menempelkan label "Indonesia", padahal isi kepentingannya tidak sepenuhnya tentang ke-Indonesia-an kita. Situasi ini mengkhawatirkan karena, sembari harus membangun diri meraih mimpi menjadi salah satu pemimpin dunia pada 2045, kita mesti menghadapi dan menanggapi berbagai tantangan kebangsaan yang perlu dengan gamblang dirumuskan.

Karena itu, ini saatnya memikirkan arah perjalanan bangsa dengan membaca dan memahami tanda-tanda zaman dan tantangan yang dibawanya.

Membaca tanda-tanda zaman

Di antara berbagai tanda-tanda zaman, beberapa perlu dibaca secara saksama: diidentifikasi kejadiannya, diamati kecenderungannya, dan ditemukan penggerak serta penyebabnya. Mesti cermat pula mengamati hakikat (ontologi), penjelas (epistemologi), dan implikasi (aksiologi)-nya.

Pertama, kondisi sosial yang menyangkut interaksi antarbudaya, kelompok, generasi, latar ekonomi, dan wilayah. Dinamika demokratisasi dan desentralisasi dua dekade terakhir memengaruhi tak hanya relasi masyarakat dan pemerintah, tetapi juga relasi antar-masyarakat sendiri.

Di satu sisi, pemerintah lebih bertanggung-gugat (akuntabel) pada pemilihnya. Di sisi lain, muncul dampak tak-termaksud: perselisihan antarpemilih, yang kerap berujung pada perpecahan, mulai dari kelompok hobi hingga relasi suami-istri. Penggunaan teknologi informasi dan media yang meningkat tanpa diiringi literasi—dan malah di-banjiri oleh kabar bohong—membuat masyarakat tak kunjung dewasa dan makin rentan pembelahan.

Kedua, dalam politik dan hi-dup-publik, urusan pemerintahan dan kenegaraan makin tercampuri so-al kekuasaan yang berke-lindan dengan kepentingan bisnis. Oligarki, nama situasi ini.

Banyak politikus atau pengusaha yang mau, mengerti hakikat *public policy*. Politisasi dan transaksi mewarnai pengambilan keputusan yang menentukan hidup-mati warga negeri. Akibatnya, wacana tentang kebijakan makin miskin substansi dan tidak ada insentif bagi institusi publik dan pemerintahan, apalagi aparatur sipil negara, untuk sungguh-sungguh mereformasi diri.

Ketiga, ekonomi tumbuh cukup stabil meski sempat terpuruk diterjang pandemi sebelum merangkak naik lagi. Namun, untuk mengejar target menjadi negara maju, banyak kerja mesti dipacu. Jebakan negara berprestasi menengahkan sulit dihindari jika soal mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan, perbaikan layanan kesehatan, dan pendidikan tidak digarap serius.

Juga strategi kependudukan dan ketenagakerjaan. Ekonomi, termasuk investasi, mesti dibangun dengan landasan pengetahuan dan inovasi (*knowledge-and innovation-based economy*) untuk mengejar nilai tambah, bukan lagi mengandalkan jual-beli komoditas dan industri alas kaki.

Keempat, meski riset, teknologi, dan inovasi menjadi kunci kemajuan bangsa, saat ini ekosistemnya belum optimal tertata. Perangai-ilmiah (*scientific temper*) belum menjadi watak warga. Ilmu pengetahuan belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan, sejumlah kebijakan dianggap antisains.

Birokrasi dan kelembagaan publik perlu dilatih memanfaatkan teknologi dan inovasi agar proses bisnis pemerintah tak tertatih-tatih. Manajemen talenta peneliti dan inovator belum optimal sehingga kinerja mereka tertinggal dari kolega-sejawat di negara lain. Banyak temuan dan inovasi belum mengendrak daya saing karena hilirisasi masih setengah hati. Padahal, teknologi baru mesti segera dikembangkan dan dikuasai.

Kelima, saat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan mulai tumbuh di masyarakat, eksploitasi alam serampangan atas nama pembangunan terus berjalan. Kelindan penguasa dan pengusaha memang miskin imajinasi akan kelestarian lingkungan. Apalagi kri-



DIDIE SW

sis akibat perubahan iklim.

Ia hanya berpikir bagaimana menanggung un-tung se-banyak-banyaknya, dan membi-cepat-cepatnya, dan membi-arkan alam menanggung bebannya. Pa-batnya, negeri kaya sumber daya alam ini kian merana didera keserakahan me-reka, lupa korban hancurnya alam adalah semuanya.

Terakhir, soal nilai. Imperatif sebagai bangsa berbineka adalah inklusi, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, ia menghadapi tantangan besar: perbedaan pandangan, pemikiran, apala-gi keyakinan dan pilihan politik men-jadi legitimasi menihilkan inklusi.

Apalagi hukum dan tata kelola juga belum mampu memastikan keadilan bagi semua. Erosi inklusi ini menggerus fondasi negeri. Kesetaraan dan keseti-a-kawanan sebagai satu bangsa akan ting-gal angan ditelan masa jika tak ada afir-masi mendorong inklusi. Keberpihakan pada minoritas, penyandang disabilitas, perempuan dan anak, kaum miskin dan terisihkan harus menjadi jiwa kebijakan dan rencana pembangunan.

Bacaan tanda-tanda zaman di atas mungkin miskin sopan santun diksi ka-rena bicara apa adanya. Namun, semoga ia menunjukkan substansi tantangan ke-bangsaan yang mesti berani kita tanggapi demi menghidupi cita-cita para pendiri bangsa.

Menghidupi cita-cita

Cita-cita para pendiri bangsa yang pertama-tama bukanlah agar negara ini menjadi pemimpin dunia, melainkan menjadi negara yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" (Pembu-kaan UUD 1945).

Jika negeri ini sungguh merdeka (bisa menentukan sendiri arah pembangunan dan kemajuan), bersatu (sebagai anak bangsa yang berbineka), berdaulat (mampu mengelola sendiri sumber daya pembangunan), adil (memastikan semua warga berkedudukan sama di depan hukum), dan makmur (hasil pembangunan dinikmati semua secara berlimpah), de-ngan sendirinya ia akan dihormati dan menjadi pemimpin dunia.

Jadi, menjadi pemimpin dunia adalah akibat, bukan sebab. Bagaimana mewu-judkannya? Jawabnya pun lugas: dengan "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke-hidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia" (*ibid*).

Maka, satu kunci menjawab berbagai tantangan kebangsaan itu adalah adanya pemerintahan yang kuat, cakap, dan berdaya. Ia mesti kuat agar bisa melin-dungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; cakap agar bisa membangun untuk menyejahterakan dan mencerdas-kan warga; dan berdaya agar bisa aktif melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, pemerintah yang kuat, cakap, dan berdaya tidak jatuh dari langit. Ia mesti diupayakan. Dan merefleksikan berbagai tantangan di atas, langkah mendasar untuk melakukannya adalah membersihkan pemerintahan dari oli-garki, bukan sekadar reformasi birokrasi. Korupsi dan inefisiensi hanyalah gejala, tetapi watak oligarkilah penyebabnya.

Dan ini bukan hanya perkara uang, melainkan remuknya seluruh sumber daya publik, termasuk hukum dan tata kelola dalam hidup bersama kita.

Soal oligarki tidak boleh hanya jadi blakan diakui. Seperti dulu keberadaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda di-akui sebagai penjajahan, bukan sekadar perdagangan. Itu pijakan untuk bangkit mencari solusi.

Namun, memang memberantas wa-tak oligarki tidak mudah, apalagi di tengah berbagai agenda pembangunan: mulai dari pemulihan pascapandemi, persiapan Pemilu 2024, hingga peminda-han ibu kota negara. Yang bisa dilaku-kan adalah memperketat pengawasan publik agar kinerja pemerintah lebih baik.

Memberikan kritik, masukan, bahkan keberatan atas kebijakan pemerintah adalah hak warga yang dilindungi kon-stitusi dan tidak boleh dilihat sebagai sebuah sikap anti. Dan di sinilah sebe-narnya, baik warga maupun pemerintah, berperan dalam proses berbangsa: mem-bangun kesadaran sebagai "Orang In-donesia"—bukan sekadar penduduk, apalagi hanya penghuni pulau-pulau di Nusantara ini.

Membentuk Indonesia

Indonesia bukanlah sebuah konstruk-si konstan. Masa depan negeri ini tidak bisa hanya diramalkan lewat proyeksi dan model statistika seberapa pun cang-gihnya. Indonesia dibentuk dan terbentuk lewat waktu dan tindakan mereka yang tinggal dan berinteraksi di dalam-nya. Karena itu, pembentukan Indonesia masa depan mesti menjadi upaya sadar kita sebagai warga.

Masa depan Indonesia tak terletak di tangan orang Jawa, Minang, Batak, Da-yak, Bugis, atau suku lainnya. Masa depan Indonesia juga tak terletak di tangan orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau pemeluk agama dan kepercayaan lain. Apalagi di tangan partai atau kelompok A, B, atau C. Masa depan Indonesia—sebagaimana divisi-kan Dr Soetomo—terletak di tangan orang-orang Indonesia yang terdidik ba-ik. Dan dalam kerangka negara-bangsa modern, juga di tangan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Hanya dengan kesadaran ini, kita akan sungguh bangkit sebagai satu bangsa.